

BAB 1

1. PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Peran penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari salah satu tujuan penting dalam mendirikan suatu perusahaan, dengan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, melalui peningkatan nilai perusahaan, dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Beberapa mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik keagenan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit.

Selain hal diatas, *corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan target-target dari suatu perusahaan, & menjadi sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Darmawati, dkk (dalam Sam'ani, 2008). Disampaikan Newel & Wilson (dalam Sabrina, 2010) pada artikel yang berjudul *A Premium for Good Governance* bahwa secara teoritis praktek *good corporate governace* dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang muncul akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat kesehatan perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan, karena dalam mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan adalah melalui laporan keuangan.

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah melalui rasio keuangan contohnya Rasio yang umum menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas (ROA, EPS, PER).

Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan kinerja keuangan pada beberapa perusahaan dapat dilihat dari *Return on Asset* (ROA) yang mewakili pengukuran untuk aspek laba perusahaan atau rentabilitas. ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva. (Wardiah, 2013). Semakin tinggi rasio ROA, semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga kenaikan laba bersih bank tersebut semakin tinggi, selain itu Kinerja keuangan perusahaan yang lain adalah *Return on Equity* (ROE). ROE adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengukur pengembalian untuk pemegang saham Fachrudin (2011). Semakin tinggi ROE yang dicapai, semakin mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan return yang tinggi bagi pemegang saham.

Perusahaan yang sering menjadi sorotan dan memiliki peran yang penting bagi suatu Negara dalam perekonomian khususnya Indonesia adalah Korporasi atau perusahaan, selain itu korporasi juga langsung terlibat dalam proses alokasi sumber daya yang digunakan oleh masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi, barang dan jasa. Peran ini sangat penting bagi masyarakat terkait dengan keberadaan sumber daya yang ekonomis dan sangat terbatas, oleh sebab itu harus dioptimalkan sebaik mungkin.

Dikutip dari [KOMPAS.COM]. Semenjak bergantinya pemilihan Presiden 2020 dan pergantian Menteri yang dibawah naungan Bapak Presiden Jokowi dan Jokowi khususnya Menteri BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir yang sekarang dikagumi oleh masyarakat sehingga mendapat predikat menteri terbaik oleh masyarakat walaupun baru saja menjabat sebagai Menteri namun cara kerjanya yang dibilang apik oleh masyarakat yang kini bisa membongkar kasus yang terjadi di BUMN yang selama ini sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi namun baru terungkap setelah kepemimpinan Erick Thohir, maka dari itu Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa integritas *Good Corporate Governance* selama ini masih kurang sehingga kasus penyelundupan yang terjadi di PT Garuda itu terjadi, maka dari kejadian tersebut Erick Thohir mengatakan perlu diterapkannya lagi *Good Corporate Governance* di sistem pemerintahan ini, supaya meminimalisir kejadian yang terjadi seperti kasus pada PT Garuda. Salah satu contoh korporasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana Perusahaan ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat dan mampu memberikan kontribusi bagi yang bersangkutan dan semua pihak yang berkepentingan.

Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yang pertama tentang kisruhnya Laporan Keuangan pada tahun buku 2018 yang tidak sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dimana PT Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahahata Aero Teknologi. Bursa Efek Indonesia (BEI) lalu memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh Laporan Keuangan tersebut. Pertemuan pula dilakukan beserta auditor yang menyelidiki Laporan Keuangan. KAP yang digunakan yakni KAP

Tnubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan. Kemudian Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi sesudah laporan keuangannya ditolak oleh 2 komisarisnya. Maskapai ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dievaluasi tidak sesuai lantaran memasukan keuntungan dari PT Mahata.

Kemudian PT Mahata pun buka bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia bawasannya Mahaata mencatatkan utang sebanyak USD239 juta pada Garuda, dan Garuda dicatatkan pada Laporan Keuangan 2018 dalam kolom pendapatan. Pada tanggal 14 juni 2019 Kamenku menemukan dugaan Laporan Keuangan Garuda yang tak sesuai dengan standar. Sekertaris Jendral Kamenku Hadiyanto menyatakan, hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akhirnya pada tanggal 28 juni 2019 Garuda Indonesia,Auditor,KAP mendapat sanksi yang diberikan Kamenku,OJK dan BEI

Kemudian perkara ke-2 Garuda Indonesia terjerat perkara yang berdampak dalam pencopotan Direktur utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Ashkara.

Pemberhentian Dirut Garuda tersebut, dijelaskan Menteri BUMN Erick Thohir karena yang bersangkutan diketahui sudah menyelundupkan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 dan 2 sepeda Brompton.

Dikutip dari [KOMPAS.COM]. Selain dari PT Garuda, Berikut deretan BUMN yang tersandung kasus di era Erick Thohir.

1.	Jiwasray a	<ul style="list-style-type: none"> ● keuangan Jiwasraya. Investasi terkonsentrasi pada saham dan reksa dana saham berkualitas rendah. Ada pula indikasi rekayasa dalam hal pembentukan harga saham. Akibatnya, Jiwasraya kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran klaim Rp 16 triliun. Ekuitas Jiwasraya per Desember 2019 juga tercatat negatif, yakni Rp 28 triliun. ● Dana yang dihimpun dari Saving Plan diinvestasikan pada instrumen saham dan reksa dana berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan. ● Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2018 menemukan adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan. Praktik yang diduga melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak lain di luar perusahaan itu mengakibatkan kerugian internal dan negara.
2.	Asabri	<ul style="list-style-type: none"> ● PT Asabri (Persero) mengakui kerugian perusahaan bersumber dari kesalahan pengelolaan investasi. ● Menurut Sonny, penurunan kinerja investasi terjadi karena nilai saham dan reksa dana saham turun. Dalam laporan keuangan yang disampaikan ke Komisi XI DPR terungkap, total aset lancar Asabri turun dari Rp 35,52 triliun pada akhir 2018 jadi Rp 21,99 triliun di akhir 2019. Nilai aset keuangan juga turun dari Rp 5,9 triliun jadi Rp 1,29 triliun selama kurun itu.

Terkait dengan kondisi diatas, menurut Triaji (dalam Saifi,2017) pada umumnya kelemahan BUMN antara lain masih rendahnya penerapan GCG, belum berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian intern, rendahnya integritas

Direksi, praktik mark-up, terjadinya penyimpangan oleh direksi BUMN, pemberian paket remunerasi yang berlebihan kepada Direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja, transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen kurang memperhatikan kepentingan perusahaan, intervensi pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN, dan adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan manajemen.

Menurut Soembodo (dalam Saifi, 2017) belum optimalnya kinerja BUMN dikarenakan penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan *stakeholders* yang lain. FCGI mengungkapkan *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern & ekstern lainnya yang berkaitan menggunakan hak dan kewajiban dengan menggunakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Selain contoh diatas Berikut adalah beberapa contoh potret dari BUMN tentang kinerja keuangan :

<ul style="list-style-type: none"> ● Tahun 2017 kasus Krakatau steel Kinerja pada triwulan pertama mengalami kerugian sebesar US \$22,24 juta atau relatif membaik dibandingkan kerugian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 	
--	--

<p>US \$ 62,84 juta. Hal ini ditimbulkan faktor eksternal yang bersifat <i>uncontrollable</i> juga sebagian ditimbulkan lemahnya daya asing</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan aset 2018 sebesar Rp. 8.092 T tumbuh 12,23% di banding 2015 Rp. 7.210 T, maka terjadi lonjakan aset hingga 40,48% ● Pertumbuhan ekuitas 2018 Rp. 2.479 T sebesar 4,16% dibanding 2017 Rp. 2.380 T dan tumbuh 24,51[^] dibanding 2015 Rp. 1.991 T ● Pertumbuhan laba 2018 Rp.188 T tumbuh 1,08% dibanding 2017 Rp. 186 T dan tumbuh 25,33% dibanding 2015 Rp. 150 T ● Kontribusi BUMN terhadap negara pada tahun 2018 Rp. 422 T dan tumbuh 39,27% dibandig 2015 Rp. 303 T 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hal yang menarik dalam tersebut bahwa untuk pertama kalinya di tahun 2018 BUMN unggul di bandingkan BUMN malaysia

Secara umum dengan adanya sistem pengendalian internal sering digunakan oleh perusahaan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem, maka perusahaan perlu adanya suatu sistem pengendalian yang efektif. Dengan pendapat Jeffrey (2008), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki kekuatan yang lebih dalam suatu perusahaan, misalnya perusahaan publik, swasta, dan organisasi non profit. Dengan pengendalian internal yang efektif, akan membuat kinerja keuangan yang baik dan akan meningkatkan value untuk melakukan merger

ataupun akuisisi. Hal ini sejalan dengan Hardiman (1985), yang mengungkapkan bahwa hasil penilaian dari pengendalian internal akan digunakan oleh para praktisi untuk menyimpulkan suatu opini pada laporan keuangan dalam suatu entitas pemerintahan. Pertanggung jawaban suatu pengendalian internal terletak dalam seorang manajer. Manajer akan diberikan penghargaan (recognition) lantaran sudah melaksanakan pengendalian internal secara efektif khususnya dalam pengendalian administrasi keuangan sebagai akibatnya hasilnya akan menaikkan kinerja keuangan pemerintahan.

Menurut Michelman (2008), 5 komponen berdasarkan pengendalian internal yaitu *control environment, control activities, risk management, information. and communication, & monitoring* yang memperlihatkan pandangan lebih mengenai bagaimana suatu perusahaan besar bisa menjalankan kegiatannya dan menggunakan lebih baik dibandingkan perusahaan kecil lainnya. Pengendalian internal atas laporan keuangan merupakan sebuah batasan kerja yang memperlihatkan penjelasan yang jelas dari 5 komponen pengendalian internal sebaik bagaimana mereka mengaplikasikannya pada usaha kecil, profit dan non profit, karena fokus dari pengendalian internal adalah rasio keuangan.

Dari latar belakang diatas peneliti berfokus pada mekanisme *Good corporate governance* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya penerapan *Good corporate Governance* yang baik di perusahaan, maka dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat digunakan untuk konflik

keagenan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit.

Dengan meningkatkan dewan komisaris diharapkan dapat mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Jansen (1993). Dewan Komisaris memiliki peranan yang penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris adalah inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi untuk memberikan petunjuk serta arahan dalam pengelola perusahaan. Wardhani(2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit

Penelitian Sukandar (2014) dan Herdyanto (2019) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan stratejik. Fama dan Jensen (1983). Fadilah (2017) menyatakan dewan komisaris

independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi dewan komisaris independen akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian setiawan (2016), sekaredi (2011), Hartono (2014), Purno & khafid(2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Proporsi Dewan direksi juga bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan pada rangka saat melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memilih arah kebijakan dan strategi dalam sumber daya.

Penelitian Purno & khafid(2013) menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja keuangan perusahaan

Komite Audit berperan penting dan strategis dalam menjaga kredibilitas dan proses akuntansi, seperti menciptakan sistem pengawasan perusahaan yang memadai dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan diterapkannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sebagai akibatnya konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri bisa diminimalisasi. Sam'ani (2008).

Hasil penelitian Hapsoro (2008) serta Gil dan Obradovich (2012) menemukan adanya hubungan positif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan.

Kepemilikan manajerial proporsi pemegang saham oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris Pujiati dan Widanar (dalam Sasurya & Asandimitra, 2013). Herawaty (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* karena merupakan sarana pengawasan yang efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dari manajer. Hal yang juga diharapkan dari adanya kepemilikan manajerial adalah manajemen dalam menjalankan perusahaan akan lebih konsisten dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Penelitian Gil dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* yang memiliki peran penting dalam meminimalisasi permasalahan keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif pada setiap keputusan yang diambil oleh manajer Jensen dan Meckling (1976). Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan mendorong aktivitas *monitoring* karena besarnya pengaruh mereka dalam kebijakan manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen

maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi biaya agensi akibat adanya perbedaan kepentingan. Fadilah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan. Investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga disaat kepemilikan institusi meningkat maka akan menurunkan kinerja perusahaan.

Penelitian Purno dan Khafid (2013) dan Hartono (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

Sucipto (2003) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan berdasarkan IAI Kinerja Keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Dari beberapa mekanisme Good Corporate Governance di atas menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut berperan penting dalam pengelolaan perusahaan, dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Jika mekanisme dijalankan dengan baik maka, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan agar terciptanya kinerja keuangan

yang baik dan diharapkan perusahaan bisa berjalan dalam jangka panjang agar dapat memenuhi keinginan pemegang saham.

Sistem Pengendalian Internal Definisi sistem pengendalian internal oleh *COSO* adalah proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- (1) efektivitas dan efisiensi operasi
- (2) keandalan pelaporan keuangan
- (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- (4) menjaga aset terhadap akuisisi, penggunaan, atau disposisi yang tidak sah

Hunziker (dalam Hastuti, 2017) menyatakan bahwa laporan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen. Mereka harus menjaga sistem kontrol internal dengan benar dan memastikan efektivitas kontrol internal atas pelaporan keuangan

Financial performance (kinerja keuangan) : kinerja keuangan sebagai proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Jumingan (2006)

Hasil penelitian dilakukan Hunziker (2013) dan Hastuti, (2017) menemukan adanya pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan

Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga

meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan data perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek dengan data periode Tahun yang baru dan menambahkan variabel baru yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu sistem pengendalian internal.

Maka menurut itu peneliti memakai perusahaan BUMN untuk mengukur dan menguji tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) berdasarkan mekanisme *Good Corporate Governance* menggunakan ukuran-ukuran seperti (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit) dan Sistem Pengendalian Internal. Apakah variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah kinerja keuangan perusahaan.

I.2 Perumusan masalah

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?

5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
7. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan?

I.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Untuk menganalisis Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan
3. Untuk menganalisis Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan
4. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan
5. Untuk menganalisis Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan
6. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan
7. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan perusahaan

I.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian antara lain :

1. Bagi pembaca

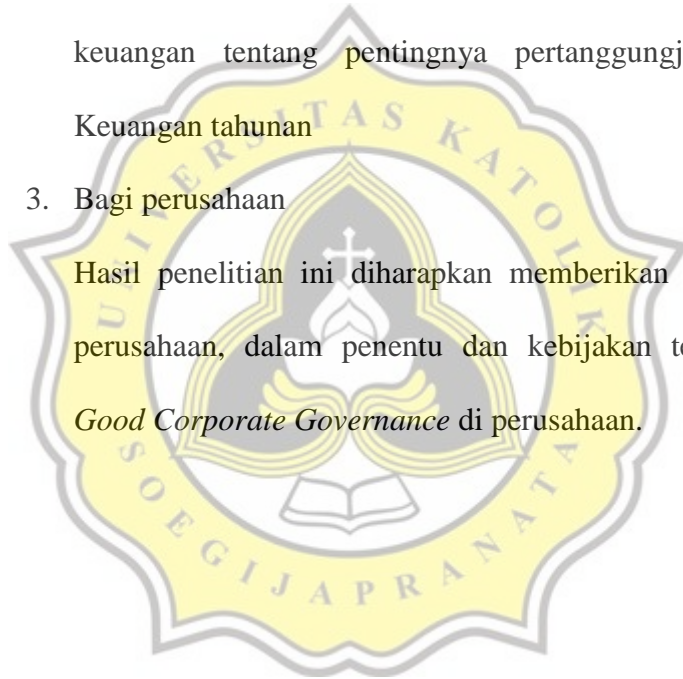
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperhatikan kondisi BUMN dengan *penerapan Good Corporate Governance* serta kinerja keuangan terhadap perusahaan

2. Bagi akademisi

Penelitian ini ingin menambah studi literatur mengenai pengaruh pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan tentang pentingnya pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahunan

3. Bagi perusahaan

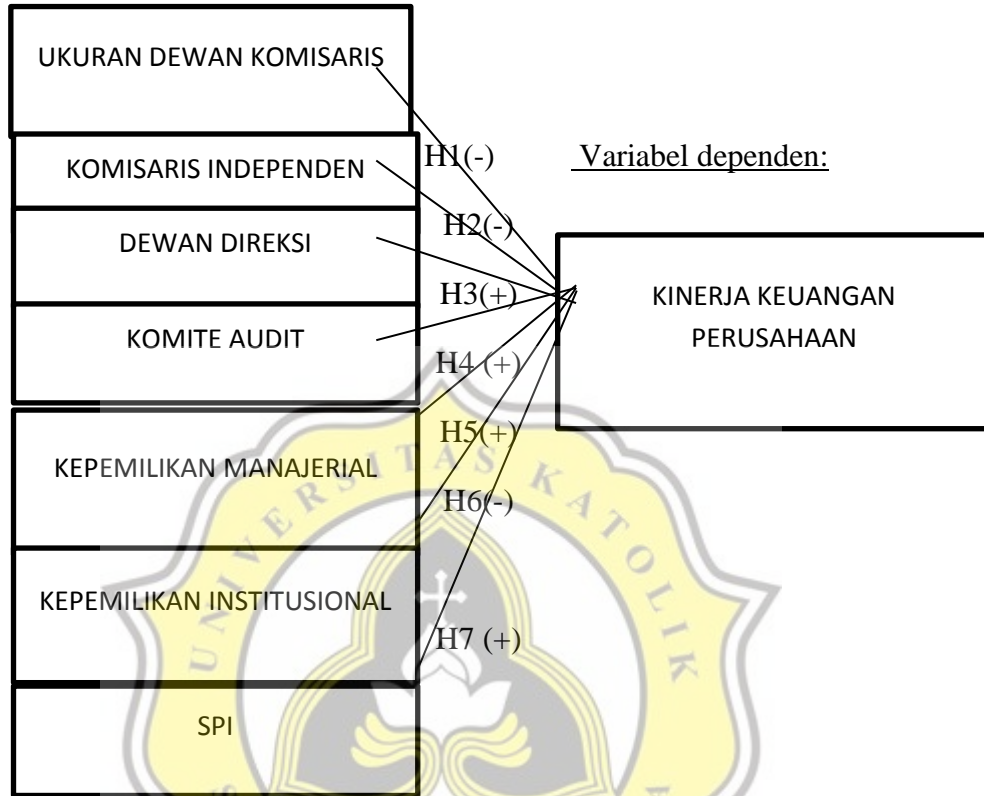
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perusahaan, dalam penentu dan kebijakan tentang penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan.



I.5 Kerangka pikir penelitian

Variabel independen

Good Corporate Governance :



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GCG yang terdiri dari ukuran komite komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional, berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, dan bahwa dewan direksi, kepemilikan manajemen, dan komite audit berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. kinerja keuangan. berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang tinjauan teori, tinjauan empiris, pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka pikir serta definisi dan pengukuran variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang populasi, sampel, metode pengumpulan data, desain riset dan alat analisa data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Hasil dan analisis berisi tentang analisa yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, saran dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.